

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2017, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

2.2 Kebijakan Keuangan

Peraturan Pemerintah R.I. No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, pada Bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih dan tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada tahun 2017 memperoleh anggaran sebesar Rp28.842.306.000,00,- (*Dua puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu rupiah*) kemudian terdapat penambahan dana hibah dari BNPB pada saat revisi tanggal 13 Juni 2017 sebesar Rp38.985.000.000,00,- (*Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah*), penambahan ini diperuntukkan untuk program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana yaitu untuk kegiatan Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik dalam Wilayah Terjadinya Bencana sebesar Rp23.800.000.000,00,- (*Dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah*) dan kegiatan Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana sebesar Rp15.185.000.000,00, (*Lima belas milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah*) sehingga anggaran BPBA menjadi Rp67.827.306.000,00,- (*Enam puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah*). Pada saat anggaran perubahan BPBA mendapat penambahan anggaran sebesar Rp367.132.202.000,00,- (*Tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), penambahan ini adalah untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp177.952.723,00,- dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp189.179.479,00,- sehingga total anggaran BPBA menjadi **Rp68.194.438.202,00,-** (***Enam puluh delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah***).

Dalam rangka pelaksanaan anggaran tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Aceh telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah merujuk kepada Qanun serta Sistem dan Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat indikasi keberhasilan dan ketidak berhasilan. Pada tahun ini realisasi keuangan BPBA hanya mencapai **Rp26.983.711.474,00** (***Dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah***) atau sebesar **39.57%**. Hal itu disebabkan karena adanya dana hibah BNPB yang masuk pada saat revisi, dana tersebut akan diluncurkan kembali pada Anggaran Tahun 2018.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Aceh menargetkan Indikator pencapaian keberhasilan sebesar 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat tingkatan keberhasilan dan ketidak berhasilan. Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam mengemban amanah untuk mencapai Visi dan Misi diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja berupa realisasi fisik dan Keuangan melalui program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada tahun 2017, antara lain :

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		
	Target	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
NON PROGRAM	100%	91,27%	91,27%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	86,11%	86,11%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	42,48%	42,48%
- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, & Listrik	100%	65,06%	65,06%
- Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	99,68%	99,68%
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	99,84%	99,84%
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100,00%	100,00%
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	95,08%	95,08%
- Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	91,29%	91,29%
- Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	41,41%	41,41%
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	80,55%	80,55%
- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	94,64%	94,64%
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	100%	84,70%	84,70%
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	53,75%	53,75%
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100%	99,84%	99,84%
- Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	100%	98,55%	98,55%
URUSAN WAJIB			
Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana	100%	90,60%	90,60%
- Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana	100%	98,74%	98,74%
- Koordinasi Penanggulangan Bencana	100%	66,61%	66,61%
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100%	93,27%	93,27%
- Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	100%	92,34%	92,34%
Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana	100%	96,47%	96,47%
- Penyusunan rencana kontijensi	100%	95,89%	95,89%
- Pengurangan Risiko Bencana	100%	96,72%	96,72%
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	100%	3,86%	3,86%
- Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan akibat bencana	100%	48,61%	48,61%
- Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana		3,22%	3,22%
- Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik dalam wilayah terjadinya bencana	100%	2,28%	2,28%
- Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	100%	81,97%	81,97%
Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja		

	Target	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana	100%	87,11%	87,11%
- Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana	100%	49,21%	49,21%
- Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana	100%	95,24%	95,24%
- Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	100%	88,64%	88,64%
JUMLAH	100%	39,57%	39,57%

Dari data di atas menunjukkan bahwa Tahun 2017 realisasi kinerja secara fisik dan keuangan adalah sebesar 39,57% yang berarti capaian secara keseluruhan tidak berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala. Pada belanja non program realisasi mencapai Rp5.136.510.650,00,- atau 91,27% realisasi tersebut dicapai sesuai dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dan pindah ke Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Sedangkan pada Belanja Program kegiatan rutin kantor yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dari anggaran Rp3.871.418.093,00,- (*Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan puluh tiga rupiah*) dapat terelisasasi sebesar Rp3.333.843.602,00,- (*Tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga rupiah*) atau sebesar 86,11% dan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur dari anggaran Rp2.395.735.000,00 (*Dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dapat terelisasi sebesar Rp2.029.137.170,00 (*Dua milyar dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah*) atau sebesar 84,70% yang berarti capaian realisasi berjalan dengan cukup baik sesuai dengan kebutuhan yang riil dipangan untuk sisa realisasinya merupakan sisa mati, sedangkan pada urusan wajib terdapat 4 (empat) program kegiatan yang menentukan Indikator keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang terdiri dari;

1. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana anggaran sebesar Rp3.871.418.093,00 (*tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan puluh tiga rupiah*) yang terealisasi sebesar Rp3.333.843.602,00,- (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah*) atau setara dengan 86,11%. Pada Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dengan tersedianya dokumen data bencana dan dokumen rekam jejak penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana sehingga terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada daerah yang terkena bencana.
 - b. Koordinasi Penanggulangan Bencana, yaitu terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pra, saat dan setelah terjadinya bencana dengan terlaksananya Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana, yaitu meningkatnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan penanggulangan bencana terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana siaga bencana baik yang peruntukkan untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu dengan teralokasinya dana baik untuk belanja bahan/material maupun belanja modal.
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, yaitu meningkatnya ketrampilan aparatur penyelenggara penanggulangan bencana dengan terlaksananya pelatihan – pelatihan untuk peningkatan keahlian bagi aparatur penanganan bencana diantaranya pelatihan penyusunan anggaran berbasis program.

2. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana anggaran sebesar Rp1.669.087.000,00 (*satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tujuh rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp1.610.149.593,00 (*Satu milyar enam ratus sepuluh juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau setara dengan 96,47%. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana dijabarkan kedalam 2 (dua) kegiatan yaitu;
 - a. Penyusunan Rencana Kontijensi, yaitu tersusunnya dokumen kebencanaan dalam pemahaman dan kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat daerah rawan bencana dengan terlaksananya Kegiatan manajerial perencanaan Kontijensi di Hotel Hermes dan Kegiatan Pembuatan rencana kontijensi di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - b. Pengurangan Risiko Bencana yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, aparatus dan dunia usaha dalam pengurangan risiko bencana. Adapaun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
 - Terlaksananya simulasi/Drill Bencana di Kabupaten Bener Meriah.
 - Terlaksananya Bulan PRB di Papua.
 - Terlaksananya Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Aceh Barat.
3. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana anggaran sebesar Rp39.687.811.000,00,- (*Tiga puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sebelas rupiah*) yang dapat terealisasi sebesar Rp1.530.679.936,00 (*Satu milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*) atau setara dengan 3,86%, pada program ini capaian realisasi rendah disebabkan karena terdapat dana hibah BNPB yang dapat direalisasikan hanya untuk biaya Perencanaan saja sedangkan untuk Pembangunan fisik dan Pengawasan akan dikucurkan kembali pada anggaran tahun 2018, dana hibah ini merupakan dana yang ditransfer dari RKUN ke RKUD pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan Landasan Operasional dalam pengelolaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2015 dan Peraturan kepala BNPB no. 4 Tahun 2015 tentang hibah dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi beserta petunjuk pelaksanaan. Jangka waktu pemanfaatan hibah adalah 12 bulan setelah tranfer dana sehingga sisa dana dapat diluncurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RKA yang akan ditetapkan. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Bencana dijabarkan dalam 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan akibat bencana yaitu meningkatnya akurasi data rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang menjadi acuan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
 - b. Kegiatan Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yaitu terlaksananya kegiatan pembangunan tanggul sungai dan terlaksananya monitoring dan evaluasi di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, dan observasi lapangan di kabupaten Aceh Selatan.
 - c. Kegiatan Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik dalam wilayah terjadinya bencana adalah terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yaitu meningkatnya kapasitas jalan dan terbangunnya kembali jembatan provinsi di Wilayah Pidie Jaya dan terlaksananya monitoring dan evaluasi di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Bireuen.
 - d. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi bencana, yaitu, terkoordinirnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana dengan terlaksananya rapat koordinasi bidang rehabilitasi dan rekontruksi bencana tentang Sinergitas Rehab Rekon sebagai investasi kawasan Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang dari potensi multi Hazard.

4. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana anggaran sebesar Rp5.581.727.000,00 (*Lima milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*) yang dapat terealisasi sebesar Rp4.862.386.500,00 (*Empat milyar delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*) atau setara dengan 87,11%. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu;
 - a. Kegiatan Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana, yaitu meningkatnya akurasi data korban bencana sehingga tersedianya acuan kebijakan penanganan darurat bencana.
 - b. Kegiatan Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) penanggulangan Bencana, yaitu sehingga Pusat kendali operasi kebencanaan dapat berfungsi dan tersedianya piket operasional PUSDALOPS 24 jam.
 - c. Kegiatan Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana adalah meningkatnya kesiagaan logistik bencana untuk keadaan darurat sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana. Yaitu tersalurnya bantuan logistik ke 9 Kabupaten. Kabupaten yang terkena bencana banjir dan tanah longsor adalah 8 kabupaten, yaitu kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Nagan Raya, Singkil, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Gangguan Gajah Liar di Kabupaten Bener Meriah.